

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *One China Policy* terhadap Taiwan dan HongKong, RRT menggunakan cara-cara yang menunjukkan keagresifannya dalam mencapai proses reunifikasi. Pada Taiwan cara seperti Resolusi PBB 2758, *Taiwan Anti-Secession Law* sangat bertentangan dengan *article 1* dari ICCPR, kebijakan awal RRT yang ingin melakukan reunifikasi secara “damai” sangat bertentangan dengan pengaplikasiannya. Pada HongKong sistem *One Country, Two System* ini tidak berjalan sesuai yang dijanjikan oleh RRT, pemerintah RRT secara perlahan-lahan mulai “mendikte” sistem pemerintahan di HongKong, ini ditunjukkan dalam penyusunan draft undang-undang di HongKong berdasarkan persetujuan dari *National People’s Congress* di Beijing, melanggar prinsip utama dari sistem itu sendiri yaitu hak otonom. Namun berbeda dengan Macau, implementasi *One Country, Two System* justru menjadi hal yang baik bagi perkembangan ekonomi di Macau. Macau sebagai pusat hiburan di Asia berupa perjudian dan casino, lebih mengutamakan ekonomi dibanding mencapai kedaulatan itu sendiri, untuk mensiasati itu maka pemerintah RRT mengembangkan bisnis dan regulasi terkait perjudian dan casino yang lebih longgar dibanding aturan perjudian di RRT.
2. implikasi *One China Policy* pada Taiwan, menyebabkan terbentuknya dua partai berbeda yang mendominasi Taiwan yaitu Partai Kuomintang dan DPP (*Democratic Progressive Party*). Dua partai ini memiliki pemahaman berbeda dalam menanggapi

One China Policy. Partai dominan Kuomintang menyatakan bahwa Taiwan tetap dapat menjalin kerjasama dengan RRT namun di satu sisi DPP berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan utama Taiwan dalam mencapai kedaulatannya maka DPP bersikeras untuk memutuskan hubungan diplomatik apapun baik secara resmi maupun non resmi RRT. Pada HongKong, *article 38 Basic Law of HongKong* menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat HongKong. *Article* ini memberikan hak bagi RRT untuk menangkap warga negara Hongkong maupun asing, ini melanggar prinsip otonom dari *One Country, Two System* serta ICCPR. Bagi Macau, *One China Policy* membawa dampak positif dalam kemajuan ekonomi di Macau dengan pembentukan lembaga yang mengatur perjudian di Macau (DICJ), salah satu bukti keberhasilannya yaitu dengan pertumbuhan pesat PDB di Macau pada tahun 2018, delapan kali lebih pesat pada tahun 1999 silam.

B. Saran

1. Perlunya pengartian yang lebih spesifik agar tidak terjadinya interpretasi hukum secara luas. ini mencegah penggunaan kekuatan sewenang-wenang. undang-undang seperti *Anti-Secession Law* dan *HongKong National Security Law* menjadi contoh dari pengartian secara luas ini. pemerintah RRT menggunakan ini sebagai cara untuk “membungkam” serta mengancam untuk menggunakan kekuatan militer apabila entitas-entitas ini ingin mengukuhkan kedaulatan mereka.
2. Dalam kasus implikasi, perlunya suatu tindakan kesepakatan tentang bagaimana menyikapi upaya RRT. Salah satunya yaitu perlunya mencari alternatif lain seperti menjalin hubungan non diplomatik dengan negara-negara lain selain RRT. Hubungan ini

diharapkan dapat membantu entitas-entitas ini mendapatkan kesempatan serta pengakuan sebagai negara di masyarakat internasional.

